

PENGARUH EFEKTIVITAS SOSIALISASI POLITIK DAN PENDIDIKAN PEMILIH TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI KOTA SERANG

Hanifa

ABSTRACT

This study analyzes the influence of the Effectiveness of Political Socialization (X1) and Voter Education (X2) on Community Participation (Y) in the 2024 Regional Head Election in Serang City, Banten Province. The research uses a positivistic approach with a quantitative explanatory design, collecting data through questionnaires distributed to respondents. The population consists of Indonesian citizens aged 17 years and above who live within the working area of the Serang City General Elections Commission. A sample of 100 respondents was determined using the Taro Yamane formula, and simple random sampling was used. The results show that political socialization and voter education have a positive, simultaneous effect on community participation, meaning that increases in both variables are associated with higher participation levels. Correlation analysis indicates that political socialization has a positive and very significant relationship with community participation, while the combined effect of political socialization and voter education also shows a positive and significant influence with a moderately strong level. The coefficient of determination reveals that political socialization contributes 26.1%, voter education contributes 31.7%, and both variables together contribute 33.0% to community participation, while the remaining 67.0% is influenced by other factors outside this study.

Keywords: *Effectiveness of Political Socialization, Voter Education, and Public Participation*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaruh Efektivitas Sosialisasi Politik (X1) dan Pendidikan Pemilih (X2) terhadap Partisipasi Masyarakat (Y) pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Serang, Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivistik dengan desain penelitian eksplanatori kuantitatif, serta mengumpulkan data melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Populasi penelitian adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas dan berdomisili di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang. Sampel penelitian berjumlah 100 responden yang ditentukan menggunakan rumus Taro Yamane, dengan teknik pengambilan sampel simple random sampling (acak sederhana). Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sosialisasi politik dan pendidikan pemilih secara simultan berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat, yang berarti bahwa peningkatan pada kedua variabel tersebut berkaitan dengan meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat. Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa sosialisasi politik memiliki hubungan yang positif dan sangat signifikan dengan partisipasi masyarakat, sedangkan pengaruh gabungan antara sosialisasi politik dan pendidikan pemilih juga menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan dengan tingkat kekuatan hubungan yang sedang. Hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa sosialisasi politik memberikan kontribusi sebesar 26,1%, pendidikan pemilih memberikan kontribusi sebesar 31,7%, dan kedua variabel secara

bersama-sama memberikan kontribusi sebesar 33,0% terhadap partisipasi masyarakat, sedangkan 67,0% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini.

Kata Kunci: Efektivitas Sosialisasi Politik, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten. Pada Tahun 2019, terdapat perbaruan luasan wilayah administrasi berdasarkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Provinsi Banten memiliki luas 9.662,92 km². Dimana provinsi Banten tercatat memiliki 2 (dua) Kota yaitu Tangerang dan Cilegon dan 4 (empat) Kabupaten, yaitu Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang. Provinsi Banten juga telah mengalami pemekaran wilayah sehingga terbentuk dua Kota baru, yakni Kota Serang dari Kabupaten Serang (UU Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten) serta Kota Tangerang Selatan dari Kabupaten Tangerang (UU Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten).

Sisi topografi, secara umum kondisi topografi wilayah Provinsi Banten merupakan dataran rendah yang berkisar antara 0 – 200 mdpl (meter di atas permukaan laut), dengan rincian letak di daerah Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kabupaten Pandeglang, dan sebagian besar Kabupaten Serang. Dilain sisi, sebagian kecil Kabupaten Pandeglang dan daerah Lebak Tengah memiliki ketinggian berkisar 201-2.000 mdpl serta daerah Lebak Timur memiliki ketinggian 501-2.000 mdpl yang ditunjang oleh

adanya Puncak Gunung Sanggabuana dan Gunung Halimun.

Kota Serang yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Serang, kini memiliki peran dalam penyelenggaraan pemilu khususnya di kota Serang. Komisi Pemilu Umum (KPU) Kota Serang sebagai penyelenggara pelaksanaan pemilu memiliki tugas merencanakan dan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Tingkat Kota. Dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, KPU Kota Serang memiliki program diantaranya melakukan sosialisasi politik dan Pendidikan politik khususnya bagi pemula. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, serta dapat meningkatkan pengetahuan tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah serta memahami dan mengetahui visi-misi calon kepala daerah, tata cara pencoblosan, menghindari kampanye hitam, politik uang dan cara-cara politik kotor sehingga masyarakat peduli dan peka terhadap isu-isu politik.

Namun kenyataannya walaupun KPU telah menyelenggarakan sosialisasi dan pendidikan politik masih saja adanya pelanggaran-pelanggaran seperti yang di sampaikan oleh Bawaslu Kota Serang dalam evaluasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024, ada beberapa penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Serang dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024; pertama, kampanye di tempat ibadah; kedua, politik uang; ketiga,

pemasangan alat peraga kampanye yang melanggar aturan; keempat, perusakan alat peraga kampanye pasangan calon; kelima, netralitas ASN.

Herbert McClosky (1972) menjelaskan bahwa partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Budiarjo (2008) Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara serta secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

Menurut Rush, (2007). Bahwa Sosialisasi politik adalah proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sosialisasi politik ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan dimana individu berada; selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya.

Sutaryo (2005), menjelaskan bahwa sosialisasi politik adalah: "Proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan menginternalisasikan (sampai tingkat tertentu) norma-norma sosialnya, sehingga membimbing orang tersebut untuk memperhitungkan harapan-harapan orang lain".

Ramlan Subakti (2007:18) menyatakan bahwa pendidikan politik

adalah pendidikan atau bimbingan, pembinaan warga suatu negara untuk memahami, mencintai dan memiliki rasa keterikatan diri (*sense of belonging*) yang tinggi terhadap bangsa, negara, dan seluruh perangkat ke-lembagaan yang ada.

Wangsih (2024) Pendidikan politik adalah proses Pendidikan individu untuk mempengaruhi mereka dan memperoleh pengetahuan, wawasan dan kemampuan politik agar lebih kritis dan memiliki intensional yang lebih tinggi dalam kehidupan mereka.

Permasalahan permasalahan yang ada bahwa sosialisasi politik diselenggarakan memiliki tingkat jangkauan yang terbatas, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap media sosial dan juga masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik sehingga banyak masyarakat tidak menerima informasi yang memadai. Metode sosialisasi yang dilaksanakan masih bersifat formal, sehingga tidak efektif untuk menjangkau pemilih muda. Minimnya fasilitas ruang-ruang publik fisik maupun digital sehingga menyulitkan penyelenggara pemilu untuk mensosialisasikan terkait pemilihan kepala daerah kepada masyarakat secara luas. Waktu sosialisasi yang dilakukan sangat singkat, sehingga masyarakat tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang proses Pilkada. Figur kandidat calon kepala daerah dinilai kurang bisa menarik perhatian masyarakat sehingga masyarakat cenderung acuh tak acuh. Kurang aktifnya peran perangkat kelurahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan relawan demokrasi dalam menyebarkan informasi politik. Masih rendahnya

literasi politik masyarakat, sehingga mereka tidak memahami pentingnya Pilkada dan fungsi kepala daerah. Pendidikan pemilih tidak berkelanjutan hanya pada saat akan menjelang pemilu dan pemilihan kepala daerah, hanya dilakukan menjelang hari pemilihan. Minimnya pembinaan politik kepada pemilih pemula, sehingga banyak anak muda tidak peduli terhadap pemilu. Materi pendidikan pemilih sulit dipahami, karena menggunakan istilah akademis atau tidak kontekstual. Tidak adanya program pendidikan politik berbasis komunitas, seperti kelompok tani, UMKM, karang taruna, dan majelis taklim. Masyarakat merasa tidak ada dampak langsung dari hasil Pilkada terhadap kehidupan mereka. Masih rendahnya kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu karena isu manipulasi, politik uang, atau konflik politik. Masalah teknis, seperti akses TPS yang jauh atau tidak efisiennya proses pemilihan. Pengaruh lingkungan, seperti teman atau keluarga yang juga tidak berpartisipasi sehingga menurunkan semangat pemilih.

Permasalahan permasalahan tersebut merupakan suatu pekerjaan rumah bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Serang sebagai penyelenggara pemilihan umum. Karena tingkat keberhasilan atas pelaksanaan pemilu bukan hanya terpilihnya pemimpin dan tertib serta lancarnya pelaksanaan pemilu, melainkan juga tingginya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dan bila permasalahan tersebut tidak menjadi perhatian Komisi Pemilihan Umum Kota Serang maka akan mengalami penurunan tingkat partisipasi masyarakat, yang pada

akhirnya mereka akan antipati terhadap pelaksanaan pemilu.

Nurfitriana dkk, (2021). Efektivitas kegiatan penyuluhan pendidikan politik pemilih pemula di badan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Musi Banyuasin. menyimpulkan bahwa perlu ditambahkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan penyuluhan pemilih pemula dan pelaksanaan penyuluhan pendidikan politik pemilih pemula mesti dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus serta harus adanya penambahan para staf dan SDM di bagian sosialisasi ini.

Muthowif, (2025). Meningkatkan partisipasi generasi muda dalam demokrasi: sosialisasi dan pendidikan pemilih pada pilkada Jawa Timur 2024. Menyimpulkan bahwa peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya peran mereka dalam demokrasi, dengan antusiasme tinggi selama diskusi. Selain itu, kegiatan ini memberikan kontribusi nyata terhadap upaya meningkatkan partisipasi pemilih muda dengan memberikan wawasan mendalam mengenai proses pemilu dan dampaknya terhadap kebijakan pemerintahan.

Julita, (2025) Eefektivitas sosialisasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menghadapi pilkada 2024 Kota Bengkulu. Menerangkan bahwa dengan adanya sosialisasi ini masyarakat ikut berpartisipasi dalam melakukan pemilihan umum kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak suara sehingga mereka memberikan hak suara mereka dengan ikut serta memilih sesuai dengan pilihan hati nurani mereka, hal demikian membuktikan bahwa sosialisasi yang dilakukan dalam

menghadapi pilkada sudah efektif dimana efektivitas sosialisasi komisi pemilihan umum.

Novelty penelitian ini terletak pada penggunaan dua variabel independen, yaitu efektivitas sosialisasi politik dan pendidikan pemilih, yang diuji secara simultan terhadap peningkatan partisipasi masyarakat. Hal ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang hanya mengkaji salah satu variabel secara terpisah, bersifat deskriptif, atau terbatas pada segmen pemilih tertentu seperti pemilih pemula atau generasi muda. Penelitian ini juga menggunakan paradigma positivisme dan pendekatan kuantitatif untuk menguji hubungan kausal melalui analisis statistik, sehingga memberikan temuan empiris yang lebih objektif dan terukur. Selain itu, penelitian ini dilakukan pada konteks Pilkada Tahun 2024 di Kota Serang, Provinsi Banten, yang belum pernah menjadi objek dalam penelitian terdahulu. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kebaruan berupa model empiris yang mengukur sejauh mana efektivitas sosialisasi politik dan pendidikan pemilih berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat secara menyeluruh.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan ilmu yang mempelajari proses penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan negara melalui pengelolaan organisasi publik, pelaksanaan kebijakan, serta pemberian pelayanan kepada masyarakat. Administrasi publik tidak hanya berfokus pada aktivitas birokrasi, tetapi juga pada bagaimana pemerintah mampu

memberikan pelayanan yang efektif, efisien, responsif, dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Kurniawan (2005), administrasi publik merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas.

Dalam konteks penyelenggaraan pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga publik yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu dan pemilihan kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai organisasi publik, KPU memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan demokrasi kepada masyarakat melalui penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, transparan, dan partisipatif. Salah satu bentuk pelayanan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan sosialisasi politik dan pendidikan pemilih sebagai upaya meningkatkan kualitas demokrasi serta partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dengan demikian, penelitian mengenai efektivitas sosialisasi politik dan pendidikan pemilih merupakan bagian dari kajian administrasi publik karena berkaitan dengan efektivitas pelayanan publik yang diberikan oleh KPU dalam meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Serang.

2. Efektivitas Sosialisasi Politik

Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Steers (2003) menjelaskan bahwa efektivitas organisasi menunjukkan

tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal. Pendapat tersebut diperkuat oleh Georgopoulos dan Tannenbaum (2009) yang menyatakan bahwa efektivitas merupakan kemampuan organisasi mencapai tujuan tanpa mengabaikan kemampuan organisasi dalam mempertahankan keberlangsungan pelaksanaan tugasnya.

Dalam penyelenggaraan pemilu, efektivitas sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program sosialisasi politik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Sosialisasi politik merupakan proses penyampaian nilai, norma, pengetahuan, serta informasi politik kepada masyarakat agar memahami sistem politik dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. Menurut Maran (2007), sosialisasi politik merupakan proses pembelajaran politik yang membentuk orientasi, sikap, dan perilaku politik individu melalui interaksi dengan lingkungan sosial. Pendapat tersebut sejalan dengan Rush yang menyatakan bahwa sosialisasi politik merupakan proses memperkenalkan sistem politik kepada individu sehingga terbentuk pengetahuan dan orientasi politik seseorang.

Efektivitas sosialisasi politik dapat dilihat dari sejauh mana kegiatan sosialisasi mampu meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum. Sosialisasi politik yang efektif ditandai oleh ketepatan sasaran, materi yang mudah dipahami, media komunikasi yang tepat, serta kemampuan menjangkau seluruh

lapisan masyarakat. Semakin efektif pelaksanaan sosialisasi politik oleh KPU, maka semakin tinggi pula kemungkinan masyarakat memahami proses Pilkada dan terdorong untuk berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya.

3. Pendidikan Pemilih

Pendidikan pemilih merupakan bagian dari pendidikan politik yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan hak politiknya secara bertanggung jawab. Surbakti (2007) menyatakan bahwa pendidikan politik merupakan proses pembinaan warga negara agar memahami sistem politik, mencintai bangsa dan negara, serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap kehidupan demokrasi. Sementara itu, Wangsih (2024) menjelaskan bahwa pendidikan politik merupakan proses pembelajaran yang bertujuan membentuk masyarakat yang memiliki pengetahuan politik, kemampuan berpikir kritis, serta kesadaran untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Dalam penyelenggaraan Pilkada, pendidikan pemilih tidak hanya memberikan informasi mengenai tata cara pemungutan suara, tetapi juga membangun pemahaman mengenai hak dan kewajiban pemilih, pentingnya memilih secara rasional, serta upaya mencegah praktik politik uang, kampanye hitam, dan penyebaran informasi yang menyesatkan. Oleh karena itu, pendidikan pemilih menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kualitas demokrasi karena masyarakat tidak hanya hadir untuk memilih, tetapi juga mampu menentukan pilihan secara sadar berdasarkan informasi yang benar.

4. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam penyelenggaraan demokrasi. Tingkat partisipasi masyarakat mencerminkan tingkat kesadaran politik warga negara sekaligus menjadi ukuran keberhasilan penyelenggara pemilu dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik di bidang demokrasi. Huntington dan Nelson (1994) mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara yang bertujuan memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Sementara itu, Budiardjo (2008) menjelaskan bahwa partisipasi politik merupakan aktivitas individu atau kelompok untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, baik melalui pemberian suara maupun bentuk keterlibatan lainnya dalam memengaruhi kebijakan pemerintah.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, partisipasi masyarakat tidak hanya diukur dari tingkat kehadiran pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS), tetapi juga dari kualitas partisipasi tersebut. Masyarakat yang memiliki pemahaman politik yang baik akan mampu menggunakan hak pilihnya secara rasional, memahami visi dan misi calon kepala daerah, serta menolak berbagai bentuk pelanggaran pemilu. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi masyarakat menjadi salah satu tujuan utama penyelenggaraan Pilkada yang demokratis.

5. Hubungan Efektivitas Sosialisasi Politik, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat

Efektivitas sosialisasi politik dan pendidikan pemilih merupakan dua faktor yang saling berkaitan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Sosialisasi politik yang efektif akan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai penyelenggaraan Pilkada, sedangkan pendidikan pemilih membentuk kesadaran politik sehingga masyarakat mampu menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab. Kedua program tersebut menjadi bagian dari strategi pelayanan publik yang dilaksanakan oleh KPU dalam meningkatkan kualitas demokrasi.

Hasil penelitian Nurfitriana dkk. (2021) menunjukkan bahwa kegiatan pendidikan politik yang dilakukan secara berkelanjutan mampu meningkatkan pemahaman dan partisipasi pemilih pemula. Penelitian Julita dkk. (2025) juga membuktikan bahwa efektivitas sosialisasi yang dilakukan oleh KPU berpengaruh terhadap meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada Pilkada Kota Bengkulu. Selanjutnya, Muthowif dkk. (2025) menyimpulkan bahwa pendidikan pemilih memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan partisipasi generasi muda dalam Pilkada Jawa Timur Tahun 2024. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa efektivitas sosialisasi politik dan pendidikan pemilih memiliki hubungan yang positif terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil uji Durbin-Watson diperoleh nilai sebesar **1,744**. Nilai tersebut berada pada rentang **1,7364 < 1,744 < 2,2636 (dU < DW < 4-dU)** sehingga, sesuai hasil pengujian dalam

penelitian ini, model regresi dinyatakan memenuhi kriteria pengujian autokorelasi.

b. Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji Spearman menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel Efektivitas Sosialisasi Politik sebesar **0,151** dan Pendidikan Pemilih sebesar **0,253**. Kedua nilai tersebut lebih besar dari **0,05**, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

c. Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai **VIF sebesar 2,550** pada kedua variabel independen. Nilai tersebut lebih kecil dari **5**, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam model regresi.

2. Pengujian Hipotesis

a. Pengaruh Efektivitas Sosialisasi Politik (X_1) terhadap Partisipasi Masyarakat (Y)

Persamaan regresi sederhana yang diperoleh adalah:

$$Y = 17,027 + 0,812X_1$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan Efektivitas Sosialisasi Politik akan meningkatkan Partisipasi Masyarakat sebesar **0,812** satuan.

Hasil uji F menunjukkan nilai **Fhitung = 34,535** dengan signifikansi **0,000 (< 0,05)**, sehingga persamaan regresi dinyatakan signifikan. Selain itu, hasil uji linearitas menunjukkan nilai **Fhitung = 1,263** dengan signifikansi **0,233 (> 0,05)**, yang berarti hubungan kedua variabel bersifat linear.

Nilai koefisien korelasi sebesar **0,510** menunjukkan hubungan positif dengan tingkat hubungan sedang. Hasil uji signifikansi menghasilkan nilai **thitung = 5,877** dengan signifikansi **0,000**,

sehingga hubungan tersebut signifikan. Sementara itu, koefisien determinasi sebesar **26,1%** menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat dipengaruhi oleh Efektivitas Sosialisasi Politik sebesar **26,1%**, sedangkan **73,9%** dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.

b. Pengaruh Pendidikan Pemilih (X_2) terhadap Partisipasi Masyarakat (Y)

Persamaan regresi sederhana yang diperoleh adalah:

$$Y = 17,869 + 0,643X_2$$

Artinya, setiap peningkatan satu satuan Pendidikan Pemilih akan meningkatkan Partisipasi Masyarakat sebesar **0,643** satuan.

Hasil uji F menunjukkan nilai **45,566** dengan signifikansi **0,000**, sehingga persamaan regresi dinyatakan signifikan. Hasil uji linearitas juga menunjukkan hubungan linear dengan nilai **Fhitung = 1,073** dan signifikansi **0,394 (>0,05)**.

Koefisien korelasi sebesar **0,563** menunjukkan hubungan positif dengan tingkat hubungan sedang. Nilai **thitung = 6,750** dengan signifikansi **0,000** menunjukkan bahwa hubungan tersebut signifikan. Koefisien determinasi sebesar **31,7%** mengindikasikan bahwa Pendidikan Pemilih memberikan kontribusi sebesar **31,7%** terhadap Partisipasi Masyarakat, sedangkan **68,3%** dipengaruhi oleh faktor lain.

c. Pengaruh Efektivitas Sosialisasi Politik (X_1) dan Pendidikan Pemilih (X_2) terhadap Partisipasi Masyarakat (Y)

Persamaan regresi berganda yang diperoleh adalah:

$$Y = 13,345 + 0,289X_1 + 0,481X_2$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan Efektivitas Sosialisasi Politik maupun Pendidikan

Pemilih akan meningkatkan Partisipasi Masyarakat.

Hasil uji F menunjukkan nilai **23,924** dengan signifikansi **0,000 ($<0,05$)**, sehingga model regresi berganda dinyatakan signifikan. Nilai koefisien korelasi berganda sebesar **0,575** menunjukkan hubungan positif dengan tingkat hubungan sedang. Koefisien determinasi sebesar **33,0%** menunjukkan bahwa Efektivitas Sosialisasi Politik dan Pendidikan Pemilih secara simultan memberikan kontribusi sebesar **33,0%** terhadap Partisipasi Masyarakat, sedangkan **67,0%** sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian.

1. Pengaruh Efektivitas Sosialisasi Politik (X_1) terhadap Partisipasi Masyarakat (Y)

Berdasarkan hasil penelitian tentang Efektivitas Sosialisasi Politik terhadap Partisipasi Masyarakat diperoleh bahwa nilai korelasi sebesar 0,510 dengan tingkat kontribusi sebesar 26,1 % serta, nilai uji t diperoleh angka t_{hitung} (5,877) $> t_{tabel(0,99,98)}$ (2,3650) dan angka signifikansi (0,000) $< 0,05$. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh Efektivitas Sosialisasi Politik terhadap partisipasi masyarakat, memiliki hubungan positif dengan tingkat hubungan yang cukup kuat atau sedang, serta signifikan. Hal tersebut berarti bahwa Efektivitas Sosialisasi Politik dapat meningkatkan Partisipasi Masyarakat, semakin gencar sosialisasi politik yang dilakukan, maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi masyarakat khususnya dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Serang Provinsi Banten.

Efektivitas sosialisasi politik tercermin dari kejelasan materi sosialisasi, kesesuaian metode

penyampaian, intensitas kegiatan, serta kemampuan komunikator politik dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat. Sosialisasi politik yang efektif mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya Pilkada, tahapan pemilihan, profil kandidat, serta konsekuensi politik dari penggunaan hak pilih. Kondisi ini mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara sadar dan sukarela dalam pemilihan kepala daerah.

Proses pembentukan sikap dan perilaku politik masyarakat sangat dipengaruhi oleh proses komunikasi politik yang berkesinambungan. Dengan demikian, efektivitas sosialisasi politik berperan sebagai faktor penting dalam membangun kesadaran politik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada.

2. Pengaruh Pendidikan Pemilih (X_2) terhadap Partisipasi Masyarakat (Y)

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pendidikan Pemilih terhadap Partisipasi Masyarakat diperoleh bahwa nilai korelasi sebesar 0,563 dengan tingkat kontribusi sebesar 31,7% serta, nilai uji t diperoleh angka t_{hitung} (6,750) $> t_{tabel(0,99,98)}$ (2,3650) dan angka signifikansi (0,000) $< 0,05$. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendidikan pemilih merupakan faktor yang kuat dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam Pilkada.

Pendidikan pemilih berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap kritis, dan rasionalitas masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Melalui pendidikan pemilih, masyarakat tidak hanya memahami prosedur pemilihan, tetapi juga memiliki kesadaran akan pentingnya memilih pemimpin yang

berkualitas dan bertanggung jawab. Hal ini berdampak pada meningkatnya partisipasi pemilih, baik dari segi kehadiran di tempat pemungutan suara maupun dari segi kualitas pilihan politik yang diambil.

3. Terdapat pengaruh Efektivitas Sosialisasi Politik (X_1) dan Pendidikan Pemilih (X_2) secara bersama-sama terhadap Partisipasi Masyarakat (Y).

Berdasarkan hasil penelitian tentang Efektivitas Sosialisasi Politik, dan Pendidikan Pemilih secara bersama sama terhadap Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Kota Serang Provinsi Banten diperoleh bahwa nilai korelasi sebesar 0,575 dengan tingkat kontribusi sebesar 33,0%. dan nilai uji F diperoleh angka F_{hitung} (23,924) > $F_{tabel(0,99,2,97)}$ (4,8309) dan angka signifikansi (0,000) < 0,05. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh Efektivitas Sosialisasi Politik, dan Pendidikan Pemilih secara bersama sama terhadap Partisipasi Masyarakat Kota Serang Provinsi Banten menunjukkan bahwa kombinasi kedua variabel tersebut memberikan kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat tidak dapat dicapai hanya melalui satu pendekatan saja. Sosialisasi politik yang efektif perlu didukung oleh pendidikan pemilih yang memadai agar masyarakat tidak hanya mengetahui informasi politik, tetapi juga memiliki pemahaman dan kesadaran yang mendalam mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Dengan demikian, sinergi antara efektivitas sosialisasi politik dan pendidikan pemilih merupakan strategi yang tepat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah. Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah perlu mengoptimalkan kedua aspek tersebut secara terpadu untuk memperkuat kualitas demokrasi lokal di Kota Serang Provinsi Banten..

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Efektivitas Sosialisasi Politik (X_1) dan Pendidikan Pemilih (X_2) terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Partisipasi Masyarakat (Y), baik secara parsial maupun simultan. Secara parsial, peningkatan efektivitas sosialisasi politik maupun pendidikan pemilih akan diikuti oleh peningkatan partisipasi masyarakat dengan tingkat hubungan yang tergolong cukup kuat atau sedang. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pelaksanaan sosialisasi politik serta semakin tinggi kualitas pendidikan pemilih, maka kecenderungan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik juga akan meningkat.

Secara simultan, kedua variabel tersebut juga memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat tidak hanya bergantung pada satu faktor saja, tetapi memerlukan kombinasi antara sosialisasi politik yang efektif dan program pendidikan pemilih yang berkelanjutan, terstruktur, serta tepat sasaran. Oleh karena itu, upaya peningkatan partisipasi masyarakat perlu dilakukan melalui strategi yang

terintegrasi antara kedua aspek tersebut agar kualitas demokrasi dapat terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. (2007). Sosiologi skematika, teori, dan terapan. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Arrohmat, L. L., dkk. (2024). Efektivitas sosialisasi dalam pelaksanaan pemilu serentak 2024 di Kabupaten Sidoarjo. *Journal Publicuho*. ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print).
- Budiarjo, M. (2008). Dasar-dasar ilmu politik. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Cottam, M., Dietz-Uhler, B., Mastors, E., & Preston, T. (2012). Pengantar psikologi politik. Jakarta: Rajawali Pers.
- Creswell, J. W. (1994). *Research design: Qualitative and quantitative approaches*. New Delhi: Sage Publications.
- Efriza. (2012). *Political explore: Sebuah kajian ilmu politik*. Bandung: Alfabeta.
- Faturohman, E. (2012). *Pengantar ilmu politik*. Malang: UMM Press.
- Georgopoulos, B., & Tannenbaum, A. (2009). *Efektivitas organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Handoko, T. H. (2011). *Dasar-dasar manajemen produksi dan operasi (Edisi 1)*. Yogyakarta: BPFE.
- Hidayat, A. A. (2010). *Metode penelitian kesehatan: Paradigma kuantitatif*. Jakarta: Heat Books.
- Huntington, S. P., & Nelson, J. (1994). *Partisipasi politik di negara berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Julita, dkk. (2025). Efektivitas sosialisasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menghadapi Pilkada 2024 Kota Bengkulu. *Jurnal STIA Bengkulu: Committe to Administration for Education Quality*, 11(1). E-ISSN 2827-9921, P-ISSN 2088-0510.
- Kartono, K. (2009). *Pendidikan politik sebagai bagian pendidikan orang dewasa*. Bandung: Mandar Maju.
- Kurniawan, A. (2005). *Transformasi pelayanan publik*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Kurniawan, D. (2011). *Pembelajaran terpadu*. Bandung: CV Pustaka Cendekia Utama.
- Maran, M. (2007). *Pengantar sosiologi politik*. Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Maran, R. R. (2001). *Pengantar sosiologi politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mardani, R. E., dkk. (2025). Sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat terkait pemilihan umum kepala daerah di Kecamatan Selogiri. *Nusantara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3). E-ISSN 2962-4800; P-ISSN 2962-360X.
- Mardiasmo. (2017). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Muthowif, dkk. (2025). Meningkatkan partisipasi generasi muda dalam demokrasi: Sosialisasi dan pendidikan pemilih pada Pilkada Jawa Timur 2024. *Jurnal Bakti Kita*, 6(1), 1020–1128.